



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 133 TAHUN 2001

TENTANG

HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN  
PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan penyediaan tenaga listrik baik di perkotaan, di perdesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi, perlu menetapkan kembali harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, sehingga secara bertahap mencapai nilai keekonomian;
- b. bahwa dalam menetapkan harga jual tenaga listrik, Pemerintah mempertimbangkan keadilan, kemampuan daya beli masyarakat, biaya produksi dan efisiensi perusahaan, skala perusahaan dan interkoneksi sistem yang dipakai;
- c. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, subsidi kepada pelanggan secara bertahap akan dihapuskan;
- d. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, harga jual tenaga listrik perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

### Pasal 1

Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dinyatakan dalam Tarif Dasar Listrik Tahun 2002, berdasarkan Golongan Tarif Dasar Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

### Pasal 2

Tarif Dasar Listrik Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Pelayanan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B;
- b. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A dan III B;
- c. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A dan IV B;
- d. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran V A dan V B;
- e. Tarif Dasar Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI A dan VI B;
- f. Tarif Dasar Listrik untuk Traksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII A dan VII B;
- g. Tarif Dasar Listrik untuk Curah (*bulk*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII A dan VIII B;
- h. Tarif Dasar Listrik untuk Multiguna sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX A dan IX B.

### Pasal 3

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

### Pasal 5

Dengan ditetapkan Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 94) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 160

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 133 TAHUN 2001  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

GOLONGAN TARIF DASAR LISTRIK

NO.	GOLONGAN TARIF TR/TM/TT	BATAS DAYA		KETERANGAN
1.	S-1/TR	220 VA		Golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil.
2.	S-2/TR	250 VA s.d. 200 kVA		Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang.
3.	S-3/TM	di atas 200 kVA		Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar.
4.	R-1/TR	250 VA s.d 2.200 VA		Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil.
5.	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA		Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah.
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA		Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar.
7.	B-1/TR	250 VA s.d. 2.200 VA		Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil.
8.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA		Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah.
9.	B-3/TM	di atas 200 kVA		Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar.
10.	I-1/TR	450 VA s.d. 14 kVA		Golongan tarif untuk keperluan industri kecil/rumah tangga.
11.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA		Golongan tarif untuk keperluan industri sedang.
12.	I-3/TM	di atas 200 kVA		Golongan tarif untuk keperluan industri menengah.
13.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas		Golongan tarif untuk keperluan industri besar.
14.	P-1/TR	250 VA s.d. 200 kVA		Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah kecil dan sedang.
15.	P-2/TM	di atas 200 kVA		Golongan tarif untuk keperluan kantor pemerintah besar.
16.	P-3/TR			Golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum.
17.	T/TM	di atas 200 kVA		Golongan tarif untuk traksi diperuntukkan bagi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kereta Api Indonesia.
18.	C/TM	di atas 200 kVA		Golongan tarif curah ( <i>bulk</i> ) untuk keperluan penjualan secara curah ( <i>bulk</i> ) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (PIUKU).

19.	M/TR, TM, TT		Golongan tarif multiguna diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif S, R, B, I dan P.
-----	--------------	--	--

\*) Keterangan :

TR : Tegangan Rendah  
TM : Tegangan Menengah  
TT : Tegangan Tinggi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

---

LAMPIRAN II A  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 133 TAHUN 2001  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

NO	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Maret 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002	1 Januari s.d. 31 Mar. 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002
1.	S-1/TR	220 VA	-	-	Abonemen per bulan (Rp.) : 9.000	Abonemen per bulan (Rp.) : 10.200
2.	S-2/TR	450 VA	4.445	5.163	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 74 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 115 Blok III : di atas 60 kWh : 126	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 86 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 133 Blok III : di atas 60 kWh : 147
3.	S-2/TR	900 VA	6.148	7.128	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 84 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 123 Blok III : di atas 60 kWh : 145	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 97 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 143 Blok III : di atas 60 kWh : 168
4.	S-2/TR	1.300 VA	16.527	17.878	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 165 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 220 Blok III : di atas 60 kWh : 264	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 179 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 238 Blok III : di atas 60 kWh : 286
5.	S-2/TR	2.200 VA	17.862	19.241	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 167 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 246 Blok III : di atas 60 kWh : 279	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 180 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 301
6.	S-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	21.183	22.487	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 263 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 298	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 280 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 316

7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	19.449	21.265	Blok WBP = $K \times P \times 216$ Blok LWBP = $P \times 216$	Blok WBP = $K \times P \times 236$ Blok LWBP = $P \times 236$
----	--------	--------------------	--------	--------	--	--

Catatan :

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat komersial.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni  $P = 1$ .

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial  $P = 1,5$ .

Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

---

LAMPIRAN II B  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 133 TAHUN 2001  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sep. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002	1 Juli s.d. 30 Sep. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
1.	S-1/TR	220 VA	-	-	Abonemen per bulan (Rp.) : 11.800	Abonemen per bulan (Rp.) : 13.900
2.	S-2/TR	450 VA	6.082	7.204	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 101 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 157 Blok III : di atas 60 kWh : 173	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 120 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 186 Blok III : di atas 60 kWh : 205
3.	S-2/TR	900 VA	8.517	10.009	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 116 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 170 Blok III : di atas 60 kWh : 201	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 136 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 200 Blok III : di atas 60 kWh : 237
4.	S-2/TR	1.300 VA	19.229	20.710	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 192 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 256 Blok III : di atas 60 kWh : 308	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 207 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 276 Blok III : di atas 60 kWh : 331
5.	S-2/TR	2.200 VA	20.621	22.129	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 193 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 284 Blok III : di atas 60 kWh : 322	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 207 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 304 Blok III : di atas 60 kWh : 346
6.	S-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	23.791	25.219	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 296 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 334	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 314 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 354
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	23.081	25.050	Blok WBP = $K \times P \times 256$ Blok LWBP = $P \times 256$	Blok WBP = $K \times P \times 278$ Blok LWBP = $P \times 278$

Catatan :

P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat



komersial.

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni  $P = 1$ .

Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial  $P = 1,5$ .

Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

---

LAMPIRAN III A  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 133 TAHUN 2001  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002	1 Januari s.d. 31 Mar. 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	5.291	6.104	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 108 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 225 Blok III : di atas 60 kWh : 254	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 124 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 259 Blok III : di atas 60 kWh : 293
2.	R-1/TR	900 VA	11.364	12.551	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 159 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 250 Blok III : di atas 60 kWh : 278	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 176 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 276 Blok III : di atas 60 kWh : 308
3.	R-1/TR	1.300 VA	21.029	22.728	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 262 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 277 Blok III : di atas 60 kWh : 323	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 283 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 299 Blok III : di atas 60 kWh : 349
4.	R-1/TR	2.200 VA	21.523	23.398	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 268 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 283 Blok III : di atas 60 kWh : 331	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 291 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 308 Blok III : di atas 60 kWh : 360
5.	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	24.673	25.409	478	492
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	32.891	33.315	596	604

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

---

LAMPIRAN III B  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 133 TAHUN 2001  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sep. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002	1 Juli s.d. 30 Sep. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	7.016	7.862	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 143 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 298 Blok III : di atas 60 kWh : 336	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 334 Blok III : di atas 60 kWh : 377
2.	R-1/TR	900 VA	13.739	15.018	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 192 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 302 Blok III : di atas 60 kWh : 337	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 210 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 330 Blok III : di atas 60 kWh : 368
3.	R-1/TR	1.300 VA	24.427	26.271	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 304 Blok II di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 322 Blok III : di atas 60 kWh : 375	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 327 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 346 Blok III : di atas 60 kWh : 404
4.	R-1/TR	2.200 VA	25.273	27.148	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 314 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 333 Blok III : di atas 60 kWh : 388	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 338 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 358 Blok III : di atas 60 kWh : 417
5.	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	26.145	26.980	507	523
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	33.740	34.260	612	621

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN IV A  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 133 TAHUN 2001  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

**TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002	1 Januari s.d. 31 Mar. 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002
1.	B-1/TR	s.d. 450 VA	16.954	17.960	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 207 Blok II : di atas 30 kWh : 308	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 219 Blok II : di atas 30 kWh : 327
2.	B-1/TR	900 VA	19.528	20.400	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 308 Blok II : di atas 108 kWh : 339	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 322 Blok II : di atas 108 kWh : 354
3.	B-1/TR	1.300 VA	23.320	23.925	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 385 Blok II : di atas 146 kWh : 386	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 395 Blok II : di atas 146 kWh : 396
4.	B-1/TR	2.200 VA	23.945	24.672	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 387 Blok II : di atas 264 kWh : 418	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 399 Blok II : di atas 264 kWh : 430
5.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	25.003	25.830	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 426 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 447	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 440 Blok II : di atas 100 jam nyala Berikutnya : 462
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	23.336	24.022	Blok WBP = $K \times 363$ Blok LWBP = 363	Blok WBP = $K \times 374$ Blok LWBP = 374

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

---

LAMPIRAN IVB  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 133 TAHUN 2001  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

**TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002	1 Juli s.d. 30 Sept. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
1.	B-1/TR	s.d. 450 VA	18.967	20.086	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 231 Blok II : di atas 30 kWh : 345	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 245 Blok II : di atas 30 kWh : 365
2.	B-1/TR	900 VA	21.271	22.247	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 336 Blok II : di atas 108 kWh : 369	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 351 Blok II : di atas 108 kWh : 386
3.	B-1/TR	1.300 VA	24.531	25.237	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 405 Blok II : di atas 146 kWh : 406	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 417 Blok II : di atas 146 kWh : 418
4.	B-1/TR	2.200 VA	25.398	26.225	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 411 Blok II : di atas 264 kWh : 443	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 424 Blok II : di atas 264 kWh : 458
5.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	26.656	27.582	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 454 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 476	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 469 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 493
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	24.708	25.488	Blok WBP = $K \times 384$ Blok LWBP = 384	Blok WBP = $K \times 396$ Blok LWBP = 396

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

---

LAMPIRAN VA  
 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 133 TAHUN 2001  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

**TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Maret 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002	1 Januari s.d. 31 Maret 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002
1.	I-1/TR	s.d. 450 VA	17.714	19.179	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 125 Blok II : di atas 30 kWh : 240	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 135 Blok II : di atas 30 kWh : 259
2.	I-1/TR	900 VA	19.834	21.384	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 183 Blok II : di atas 72 kWh : 240	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 197 Blok II : di atas 72 kWh : 259
3.	I-1/TR	1.300 VA	23.645	24.553	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 329 Blok II : di atas 104 kWh : 339	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 342 Blok II : di atas 104 kWh : 352
4.	I-1/TR	2.200 VA	23.645	24.633	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 329 Blok II : di atas 196 kWh : 339	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 343 Blok II : di atas 196 kWh : 353
5.	I-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 14 kVA	23.645	24.720	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 329 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 339	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 344 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 355
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	24.215	25.384	Blok WBP = $K \times 326$ Blok LWBP = 326	Blok WBP = $K \times 342$ Blok LWBP = 342
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	21.690	22.525	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = $K \times 324$ di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 324 Blok LWBP = 324	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = $K \times 336$ di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 336 Blok LWBP = 336
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	20.000	20.897	320	334

Catatan :

**K** : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

**WBP** : Waktu Beban Puncak.

**LWBP** : Luar Waktu Beban Puncak.

**Jam nyala** : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,**

**Lambock V. Nahattands**

---

**LAMPIRAN V B**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 133 TAHUN 2001**  
**TANGGAL : 31 DESEMBER 2001**

**TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002	1 Juli s.d. 30 Sept. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
1.	I-1/TR	s.d. 450 VA	20.644	22.272	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 145 Blok II : di atas 30 kWh : 279	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 157 Blok II : di atas 30 kWh : 301
2.	I-1/TR	900 VA	22.934	24.645	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 211 Blok II : di atas 72 kWh : 278	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 227 Blok II : di atas 72 kWh : 298
3.	I-1/TR	1.300 VA	25.461	26.502	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 354 Blok II : di atas 104 kWh : 365	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 369 Blok II : di atas 104 kWh : 380
4.	I-1/TR	2.200 VA	25.621	26.742	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 356 Blok II : di atas 196 kWh : 368	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 372 Blok II : di atas 196 kWh : 384
5.	I-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 14 kVA	25.795	27.002	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 359 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 370	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 376 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 387
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	26.553	27.854	Blok WBP = $K \times 358$ Blok LWBP = 358	Blok WBP = $K \times 375$ Blok LWBP = 375
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	23.469	24.522	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = $K \times 350$ di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 350 Blok LWBP = 350	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = $K \times 366$ di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 366 Blok LWBP = 366
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	21.794	22.791	349	365

Catatan :

**K** : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

**WBP** : Waktu Beban Puncak.

**LWBP** : Luar Waktu Beban Puncak.

**Jam nyala** : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

[Back To Top](#)

---

LAMPIRAN VI A  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 133 TAHUN 2001  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

**TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH  
DAN PENERANGAN JALAN UMUM**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002	1 Januari s.d. 31 Mar. 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002
1.	P-1/TR	s.d. 450 VA	17.466	17.855	502	514
2.	P-1/TR	900 VA	22.617	22.854	565	571
3.	P-1/TR	1.300 VA	22.617	22.854	565	571
4.	P-1/TR	2.200 VA	22.617	22.854	565	571
5.	P-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	22.671	22.889	567	572
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	22.177	22.700	Blok WBP = K x 335 Blok LWBP = 335	Blok WBP = K x 346 Blok LWBP = 346
7.	P-3/TR	-	-	-	492	510

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

**LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.**

**Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,**

**Lambock V. Nahattands**

---

**LAMPIRAN VI B**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 133 TAHUN 2001**  
**TANGGAL : 31 DESEMBER 2001**

**TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH  
 DAN PENERANGAN JALAN UMUM**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002	1 Juli s.d. 30 Sept. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
1.	P-1/TR	s.d. 450 VA	18.243	18.687	525	538
2.	P-1/TR	900 VA	23.092	23.384	577	585
3.	P-1/TR	1.300 VA	23.092	23.384	577	585
4.	P-1/TR	2.200 VA	23.092	23.384	577	585
5.	P-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	23.107	23.384	578	585
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	23.000	23.200	Blok WBP = $K \times 357$ Blok LWBP = 357	Blok WBP = $K \times 369$ Blok LWBP = 369
7.	P-3/TR	-	-	-	528	548

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban system kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
 Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

---

**LAMPIRAN VII A**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 133 TAHUN 2001**  
**TANGGAL : 31 DESEMBER 2001**

**TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002	1 Januari s.d. 31 Mar. 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002
1.	T/TM	di atas 200 kVA	17.113 *)	17.616 *)	Blok WBP = K x 272 Blok LWBP = 272	Blok WBP = K x 280 Blok LWBP = 280

Catatan :

\*) : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan.

Untuk daya maksimum bulanan > 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur.

Untuk daya maksimum bulanan ? 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Deputi Sekretaris Kabinet**  
**Bidang Hukum dan Perundang-undangan,**

**Lambock V. Nahattands**

---



**LAMPIRAN VII B  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 133 TAHUN 2001  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2001**

**TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002	1 Juli s.d. 30 Sept. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
1.	T/TM	di atas 200 kVA	18.119 *)	18.691 *)	Blok WBP = K x 288 Blok LWBP = 288	Blok WBP = K x 297 Blok LWBP = 297
<p>Catatan :</p> <p>*) : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan.</p> <p>Untuk daya maksimum bulanan &gt; 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur.</p> <p>Untuk daya maksimum bulanan ? 0,5 dari daya tersambung, maka biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.</p> <p>WBP : Waktu Beban Puncak.</p> <p>LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.</p> <p>K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.</p>						

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,**

**Lambock V. Nahattands**

---

**LAMPIRAN VIII A**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 133 TAHUN 2001**  
**TANGGAL : 31 DESEMBER 2001**

**TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH (*BULK*)**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002	1 Januari s.d. 31 Mar. 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002
1.	C/TM	di atas 200 kVA	22.500	22.500	Blok WBP = $K \times 350$ Blok LWBP = 350	Blok WBP = $K \times 350$ Blok LWBP = 350

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah (*bulk*) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Deputi Sekretaris Kabinet**  
**Bidang Hukum dan Perundang-undangan,**

**Lambock V. Nahattands**

---

**LAMPIRAN VIII B**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 133 TAHUN 2001**  
**TANGGAL : 31 DESEMBER 2001**

**TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH (*BULK*)**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002	1 Juli s.d. 30 Sept. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
1.	C/TM	di atas 200 kVA	22.500	22.500	Blok WBP = $K \times 350$ Blok LWBP = 350	Blok WBP = $K \times 350$ Blok LWBP = 350

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah (*bulk*) kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara WBP dengan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat.

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Deputi Sekretaris Kabinet**  
**Bidang Hukum dan Perundang-undangan,**

**Lambock V. Nahattands**

---

**LAMPIRAN IX A**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 133 TAHUN 2001**  
**TANGGAL : 31 DESEMBER 2001**

**TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Januari s.d. 31 Mar. 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002	1 Januari s.d. 31 Mar. 2002	1 April s.d. 30 Juni 2002
1.	M/TR/TM/TT	-	-	-	1.176 *)	1.209 *)
<p>1. Tarif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini atau atas kesepakatan para pihak.</p> <p>2. Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan diantaranya :</p> <p>a. Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor energi listrik antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan pihak lain demi terciptanya hubungan imbal balik yang saling menguntungkan;</p> <p>b. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;</p> <p>c. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai kesepakatan bersama;</p> <p>d. Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;</p> <p>e. Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;</p> <p>f. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bersifat sementara (jangka waktu pendek);</li> <li>• tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan);</li> <li>• adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.</li> </ul>						
<p>Keterangan :</p> <p>*) Sebagai tarif maksimum.            Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).</p>						

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,**

**Lambock V. Nahattands**

---

**LAMPIRAN IX B**  
**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 133 TAHUN 2001**  
**TANGGAL : 31 DESEMBER 2001**

**TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002	1 Juli s.d. 30 Sept. 2002	1 Oktober s.d. 31 Des. 2002
1.	M/TR/TM/TT	-	-	-	1.242 *)	1.280 *)
<p>1. Tarif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini atau atas kesepakatan para pihak.</p> <p>2. Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor energi listrik antara Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan pihak lain demi terciptanya hubungan imbal balik yang saling menguntungkan;</li> <li>Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;</li> <li>Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai kesepakatan bersama;</li> <li>Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;</li> <li>Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;</li> <li>Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena : <ul style="list-style-type: none"> <li>• bersifat sementara (jangka waktu pendek);</li> <li>• tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan);</li> <li>• adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.</li> </ul> </li> </ol> <p>Keterangan :</p> <p>*) Sebagai tarif maksimum.  Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai "N" tidak lebih dari 1 (satu).</p>						

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**TTD**

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,**

**Lambock V. Nahattands**